PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TAHUN 2025

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

2.3 Latar Belakang

Merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024 diinstruksikan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah 2025-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2026. Merujuk pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa Tahun 2025 -2026, maka untuk Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 merupakan acuan dalam pelaksanaan Program/ kegiatan/sub.kegiatan selama satu tahun yang tertuang pada rencana strategis dengan perpedoman pada Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor: Tahun 2024 Tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024.

Perumusan Program/kegiatan/sub. kegiatan serta penganggaran menitikberatkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pencapaian sasaran pada rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Rencana kerja tahun 2025 juga dirumuskan untuk mensinkronkan RKPD Periode 2025-2026 dengan program /kegiatan/sub. Kegiatan yang mengakomodir urusan pelayanan dasar ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Manggarai Timur pada Tahun 2025 dengan memperhatikan Program prioritas pemerintah daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan pemerintah daerah pada tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, adalah sebagai berikut :

1. UU No. 23 tahun 2004 tentang system perencanaan pembanggunan nasional (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 4421);
2. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700.
3. Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulan bencana .

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-undang nomor 33 tahun 2008 tentang pembentukan kepulauan anambas (lembaran republic Indonesia tahun 2008 nomor 106);
5. Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik
6. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu
7. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah ; (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2008 nomor 21, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 4817);
8. Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaran penanggulangan bencana daerah.
9. Peraturan bersama Menteri Agama dan menteri dalam negeri nomor 8 dan 9 tentang Kerukunan Umat Beragama .
10. Peraturan menteri dalam negeri nomor 6 tahun 2006 pembauran kebangsaan.
11. Peraturan menteri dalam negeri nomor 61 tahun 2011 tentang pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah
12. Peraturan menteri dalam negeri nomor 42 tahun 2015 tentang tim terpadu penanganan konflik social.
13. Peraturan menteri dalam negeri nomor 57 tahun 2017 tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi ORMAS.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2018 tentang Tim Kewaspadaan Dini Di Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanan rencana pembangunan daerah .
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menegah daerah, serta tata cara perubahan rencana jangka menengah daerah, rencana jangka menegah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
17. .Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dipindai dengan CamScanner

18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Emulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Rancangan Akhir RPJMD Perubahan Provinsi NTT 2018-2023 I-5 NTT BAngkit, NTT SejAhterA Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6542);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Penjaminan Infrastruktur
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentangKlasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005- 2025, (Lemburan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lemburan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor0011);
25. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 52 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

1.3 Maksud Dan Tujuan

a) Maksud

Maksud penyusunan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun yaitu:

1. Memberikan arah dan pedoman pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah;
2. Mewujudkan pembangunan yang terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan;
3. Sebagai Pedoman penyusunan RKPD selama tahun 2025;

Dipindai dengan CamScanner

4. Menjadi pedoman DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka pengendalian pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai prioritas dan sasaran program pembangunan.

b) Tujuan penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Untuk menjabarkan Visi, Misi, dan program prioritas kepala daerah;
2. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan masa kepemimpinan KepalaDaerah;
3. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan visi, misi dan program kepala daerah;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Rancangan Akhir Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

1.4 Sistematika Penulisan

Sistemmatika penulisan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025 sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar gambar

Formulir E.29 Pengendaliann & Evaluasi terhadap kebijakan Renja Perangkat Daerah

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaann renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T.C 29 yang disesuaikan dengan perangkat Daerah masing-masing dengan format Tabel (terlampir)

2.2 Analisis Kinerja perangkat Daerah

Tabel.T-C. 30 (terlampir)

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Tabel. T-C 31 (terlampir)

2.5 Pennelaahan usulan Program dan kegiatan masyarakat

Tabel. T-C. 32 (terlampir

BAB III TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN ANNGARAN 2023

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, program, kegiatan, Sub. Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2023 yang berorientasi pada urusan wajib pelayanan dasar Urusan Pemerintahan Umum, terjadi perubahan dan penetapan Program/kegiatan/sub.kegiatan mengacu pada regulasi –regulasi terbaru yaitu

1. Pelaksanaan program pada tahun 2023, berdasarkan target yang ingin dicapai, yaitu Situasi Kantrantibmas 100% terwujud dialami masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur. Hal ini merupakan hasil upaya melakukan deteksi dini yang terdiri dari unsur masyarakat dan Instansi vertikal lainnya dengan hubungan koordinasi dan informasi melalui program **Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal. Tahun 2022 telah berubah kebijakan pemerintah dengan perubahan Nomenklatur yaitu **Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di daerah.**

Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur bersinergi dengan Lembaga/ institusi Vertikal lainnya Seperti TNI, POLRI, Tokoh Agama melalui Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) sudah optimal menjalankan tugas Koordinasi, konsultasi, sosialisasi kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Manggarai Timur yang Toleransi, Solidaritas antar penganut agama yang satu dan penganut agama lainnya demi terciptanya kerukunan hidup antar umat beragama atau menghindari intoleransi perbedaan agama dan keyakinan di Kabupaten Manggarai Timur. Seiring dengan kemajemukan kepercayaan yang ada untuk menjaga keakraban dalam kehidupan social telah dilakukan pembinaan kerukunan umat beragama dengan rapat koordinasi lintas agama serta dialog interaktif umat beragama terkait permasalahan yang ada melalui wadah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Untuk memupuk rasa nasionalisme dari berbagai suku bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Manggarai Timur, mewadahi keberadaan Paguyuban dengan berbagai suku bangsa melalui Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dengan aktifitas rapat koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan dan Fasilitasi forum Pembauran Kebangsaan. Berdasarkan target capaian renstra yaitu 150 orang yang mengikuti pembinaan pembauran dan sudah tercapai pada tahun 2022 dengan tercapainya target yang direncanakan dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis.

Dipindai dengan CamScanner

Presentasi partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur periode 2025-2029:

- Total DPT adalah 217.102, Jiwa

  Total yang menggunakan hak suaranya dalam memilih adalah 146.281, jiwa. Maka persentase partisipasi masyarakat Kabupaten Manggarai Timur dalam pemilu adalah 67%.

Dengan memberikan pemahaman penting berpolitik kepada PARPOL dan masyarakat secara Umum untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan menentukan arah demokrasi serta pendewasaan berpolitik. Pada tahun 2024 dengan target yang ingin dicapai melalui program pendidikan masyarakat dilaksanakan sosialisasi undang – undang pemilu kepada Partai Politik dan Masyarakat.

Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 sudah berjalan sebagaimana mestinya yang diharapkan. Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang pada rencana kerja pada tahun 2025, lebih akurasi terhadap dilakuan upaya-upaya yaitu

1. Koordinasi secara maksimal dengan instansi terkait
2. Mengidentifikasi berbagai permasalahan
3. Meningkatkan sosialisasi pendidikan [politik kepada masyarakat untuk memilih pemimpin daerah secara cerdas dan bijaksana dengan tindakan ikut menyalurkan suaranya dalam pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Manggarai Timur;

2.2 Analisis kinerja Pelayanan

Analisis Kinerja pelayanan Badan KesbangPol Kabupaten Manggarai Timur dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Pencapaian kinerja pelayanan KesbangPol Kabupaten Manggarai Timur tahun 2023 sebagai berikut:

1. Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik SosialMeningkatkan peran serta masyarakat madani (civil society) dibidang pemahaman dan kemampuan dibidang komponen masyarakat dalam menjaga dan membangun ketahanan social, ketahanan budaya, sumber daya alam dan ekonomi di Kabupaten Manggarai Timur terutama dikalangan Ormas/ LSM , tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda di Manggarai Timur.
2. Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan BudayaMeningkatkan kebijakan teknis dan

Dipindai dengan CamScanner

pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

3. Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
4. Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
5. Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Manggarai Timur berkaitan dengan kondisi social politik, budaya, ekonomi, agama dan juga situasi pertahanan keamanan yang terus mengalami dinamika. Memperhatikan situasi yang berkembang dewasa ini Kabupaten Manggarai Timur dapat ditemukan beberapa masalah yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Manggarai Timur sebagai Berikut:

1. Pendidikan Politik masyarakat demi meningkatkan partisispasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu maupun Pilkada di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025.
2. Pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama atua mencegah adanya intoleransi antar umat beragama dalam kehidupan sosial masyarakat.
3. Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat dikarenakan hitrogenitas dan multicultural serta arus globalisasi khususnya dibidang teknologi, informasi budaya dan ekonomi.
4. Mencegah modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional.
5. Belum dilakukan secara optimal pemberdayaan dan pengawasan terhadap LSM, ORMAS, OKP , dan Paguyuban untuk bersinergis dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Manggarai Timur tahun 2023 merupakan langka awal bagi perangkat daerah dalam

Dipindai dengan CamScanner

penyusunan rencana kerja (RENJA) pada tahun 2025 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan pelaksanaan pembangunan tahunan yaitu tahun 2025 yang berisi program, Kegiatan, Sub. Kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan.

Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungi prangkat daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam pembangunan Kabupaten Manggarai Timur.

Berikut ini adalah table review rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Masyarakat Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025.

Dipindai dengan CamScanner

Tabel. 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode					Uriusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (OutComes) /Kegiatan(Output)/ Sub. Kegiatan	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		UNIT KEI SKPD PENANGGU AB
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Capaian Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100%	9	10= (5+7+9)	11= (10/8)*100 %	
01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Skretari

Dipindai dengan CamScanner

01	**2**	**2.01**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	Kasubag Pro Anggaran Keuanga
					Penyusunan Dokumenn perencanaan perangkat daearah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Kasubag Pro Anggaran Keuanga
					Koordinasi dan Penyusunan RKA perangkat daerah	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	2 Dokumen	67%	Kasubag Pro Anggaran Keuanga
					Koordinasi dan Penyusunan DPA Perubahan SKPD	Jumlah Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Semester	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Kasubag Pro Anggaran Keuanga
01	**2**	**2.02**			**Administrasi Keuangan**	**Persentase ketersediaan administrasi keuangan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	Kasubag Pro Anggaran Keuanga
			01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	100%	14 Bulan	9 Bulan	64%	Kasubag Pro Anggaran Keuanga
			02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	9 Bulan	75%	Kasubag Pro Anggaran Keuanga

Dipindai dengan CamScanner

			03		Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Semester	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	9 Bulan	75%	Kasubag Pro Anggaran Keuanga
01	**2**	**2.05**			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kasubag Pro Anggaran Keuanga
			01		Penatausahaan barang milik daerah pada Perangkat daerah	Jumlah Dokumen pelaporan barang milik daerah pada perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	9 Bulan	75%	Kasubag Pro Anggaran Keuanga
01	2.02	2.06			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan Administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%	**100%**	**100%**	**100%**	Kasubag Umu Kepegawa
			01		Penyediaan Bahan logistik kantor	Jumlah alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	9 Bulan	75%	Kasubag Umu Kepegawa
			05		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	9 Bulan	75%	Kasubag Umu Kepegawa
			06		Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	100%	0	0	0%	Kasubag Umu Kepegawa
			08		Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah makan dan minum kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	9 Bulan	75%	Kasubag Umu Kepegawa

Dipindai dengan CamScanner

			09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	9 Bulan	75%	Kasubag Umt Kepegawa
			11		Dukungan pelaksanaan Siatem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah paket dataInternet	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	0	0	0%	Kasubag Umt Kepegawa
			03		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	12 bular	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	9 Bulan	75%	Kasubag Umt Kepegawa
01	2.02	2.07			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase penyediaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	10C%	Kasubag Umt Kepegawa
01	2.02	2.07	01		Pengadaan kendaraan bermotor roda dua	Jumlah kendaraan dinas	14 Unit	-	-	-	0%	0	0	0%	Kasubag Umt Kepegawa
			02		Pengadaan Laptop Acer	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 Unit	-	-	-	0%	0	0	0%	Kasubag Umt Kepegawa
8	01	01	2'09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daearah**	**Persentase barang milik daerah dan perizinan kendaraan yang kondisinya baik**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10C%	Kasubag Umt Kepegawa
9	01	01	2'09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional /lapangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	9 Bulan	75%	Kasubag Umt Kepegawa

Dipindai dengan CamScanner

01	2.02	2.08			**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daearh**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusann pemerintah daerah**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kasubag Umu Kepegawa
			01		Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Jasa surat menyurat	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	9 Bulan	75%	Kasubag Umu Kepegawa
			02		Penyediaan jasa sumber daya air dan listrik	Jumlah kebutuhan air dan listrik	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	9 Bulan	75%	Kasubag Umu Kepegawa
			04		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah petugas kebersihan gedung kantor	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	9 Bulan	75%	Kasubag Umu Kepegawa
			09		Penyediaan jasa pemeliharaan Biaya pemeliharaan Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional /lapangan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	9 Bulan	75%	Kasubag Umu Kepegawa
8	**01**	**02**	**2.01**	**03**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**N/A**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Kabid Ideo Wawasa Kebangsa Ketahan Ekonomi, S Budaya dan**

Dipindai dengan CamScanner

8	01	03			Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatkan masyarakat yang paham tentang Ideologi Pancasila dan Masyarakat yang paham tentang kewaspadaan dan deteksi Dini	100%	100%	100%	00%	00%	100%	100%	100%	Kasubid Ideol Wawasan Keb
8	01	03	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan	100 Org	100.00 Orang	100.00 Orang	100 Org	00%	100 Org	100 Orang	100%	Kasubid Keta Ekonomi So Budaya dan A
8	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang ikut lomba 4 konsensus kebangsaan	50 Org	50 Org	50 Org	0 Orang	0%	50 Org	0	0%	Kasubid Ideol Wawasan Keb
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	200 Orang	200 Orang	150 Orang	Kegiatan Koordinasi antar pemeluk agama kepercayaan	0%	100 Orang	-	0%	Kasubid Ideol Wawasan Keb

Dipindai dengan CamScanner

8	01	03	2.01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kabid Politik Negeri dan Or kemasyarak
8	01	03	2.01	04	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Presentase peran Partai Politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politikdan pengembangan etika serta buadaya politik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kasubid Po Dalam Ne

Dipindai dengan CamScanner

8	01	03	2.01	05	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah verifikasi dokumen keuangan Partai Politik	12 ParPol	12 ParPol	12 ParPol	12 ParPol	00%	12 ParPol	12 ParPol	100%	Kasubid Po Dalan Ne
8	01	05			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Fasilitasi Bantuan keuangan pada Partai Politik	12 Partai Politik	12 Parta Politik	12 Partai Politik	Pelaksanaan Koordinasi dibidang politik, hukum dan HAM	0%	12 Partai Politik	12 Partai Politik	100%	Kasubid Po Dalan Ne

Dipindai dengan CamScanner

8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah kegiatan diskusi politik	100 Org	100 Org	100 Org	Pelaksanaan Koordinasi forum-forum diskusi politik	0%	0	0	0%	Kasubid Po Dalam Ne
8	01	06			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase penanganan Isu-isu yang aktual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kasubid Po Dalam Ne
8	**01**	**06**	**2.01**		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**N/A**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Kabid Ideo Wawasa Kebangsa Ketahan Ekonomi, S Budaya dan**

Dipindai dengan CamScanner

8	01	06	**2.01**	01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Presentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	Kasubid Keta Ekonomi Sc Budaya dan A
					Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi FORKOPIMDA tingka Kab. Manggarai Timur	4.00 Rapat	4.00 Rapat	4.00 Rapat	4.00 Rapat	100%	4.00 Rapat	4.00 Rapat	100%	Kasubid Keta Ekonomi Sc Budaya dan A
8	**01**	**06**	**2.01**	**04**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**N/A**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Kabid Kewasp Nasional d Penanganan I**
8	01	06	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	PRESENTASE PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	Kasubic Kewaspadaa dan Kerjas intelijer

Dipindai dengan CamScanner

					Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah sosialisasi FKDM Kecamatan yang terbentuk dan Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi	150 Org	150 Org	150 Org	Pelaksanaan koordinasi FKDM	0%	100 Orang	100 Orang	100%	Kabid Kewaspadaan dan Kerjasama intelijen
						Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan konsultasi Kominda	3.00 rapat	3 Rapat	3 Rapat	3 Rapat	00%	0	0	0%	Kabid Kewaspadaan dan Kerjasama intelijen
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah rapat rencana aksi penanganan gangguan keamanan Tingkat Kabupaten Manggarai Timur	21.00 Rencana Aksi	21.00 Rencana Aksi	21.00 Rencana Aksi	2 dokumen	00%	21 Rencana Aksi	21 Rencana Aksi	100%	Kasubid Penanganan konflik

Dipindai dengan CamScanner

					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah data sektoral program penguatan ketahanan bangsa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	100%	-	-	0%	Kasubid Pena konflik
S	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Presesntase Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Yang Dibina**	**N/A**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Bidang Po Dalam Nege Organisa Kemasyaral**
					Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	PRESENTASE PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	100 Ormas	100 Ormas	100 Ormas	100 Ormas	100%	100 Ormas	100 Ormas	100%	Kasubid Orga Kemasyaral

Dipindai dengan CamScanner

				Penyusunan Program kerja dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah												Kasubid Orgs Kemas arah
				Pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah pemberdayaan terhadap Lsm, Ormas, OKP dan paguyuban yang terdata dan dilakukan pembinaan	100 Ormas	100 Ormas	100 Ormas	0		0%	200 Ormas	80 Ormas	40 %	Kasubid Orgs Kemas arah
				Pelaksanaan koordinasi dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah		0	0	0	-		0%	-	-	0%	Kasubid Orgs Kemas arah

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan Tugas dan Fungsi untuk mensukseskan RKPD Periode 2025-2026 dengan tujuan Perangkat Daerah yaitu meningkatkan masyarakat yang paham tentang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan indikator Tujuan /Sasaran Capaian yaitu Indeks KesbangPol.

Adapun target Tujuan/sasaran Badan KesbangPol yaitu Indeks KesbangPol dengan Target Capaian Kinerja Tujuan/sasaran yaitu 2019 , 71,654 Tahun 2025. 73,2

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penetapan kebijakan penyelenggaran program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Manggarai Timur, mengacu pada kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga merujuk pada kebijakan Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri dengan urusan wajib pelayanan dasar ketentraman dan ketertiban umum dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kab. Manggarai Timur

Tahun 2025

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								2.845.200.584;					41.93 .577.(89,0(
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								2.845.200.584;					41.93 .577.(89,0(
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								2.845.200.584;					41.93 .577.(89,0(
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1.577.883.464					1.837 774.7(0,0(
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								25.500.000;					32.00 1.000,((
8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Persentase ketercapain penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yg berkualitas	- Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persentase	3 Dokumen	100 Persentase	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	10.00 1.000,((
8	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													

Dipindai dengan CamScanner

						Persentase ketercapain penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yg berkualitas	- Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persentase	3 Dokumen	100 Persentase	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	10.000.000,00
8	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
						Persentase ketercapain penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yg berkualitas	- Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persentase	1 Dokumen	100 Persentase	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00
8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
						Persentase ketercapain penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yg berkualitas	- Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persentase	12 Laporan	100 Persentase	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	7.000.000,00
8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

Dipindai dengan CamScanner

						Persentase ketercapain penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yg berkualitas	- Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persentase	12 Laporan	100 Persentase	3.500.000,00	Dana Transfer-Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	7.000.000,00
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.383.581.364;					1.436.084.75 5,0
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Persentase ketercapain penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat daerah	- Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persentase	14 Orang/bulan	100 Persentase	1.275.883.972;	Dana Transfer-Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.356.848.6 1,0
8	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
						Persentase ketercapain penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat daerah	- Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persentase	12 Dokumen	100 Persentase	102.897.382;	Dana Transfer-Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	150.000.000
8	01	01	2.02	0003	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
						Persentase ketercapain penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat daerah	- Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persentase	12 Dokumen	100 Persentase	5.000.000,00	Dana Transfer-Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	9.000.000,0
8	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													

Dipindai dengan CamScanner

						Persentase ketercapain penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat daerah	- Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persentase	1 Laporan	100 Persentase	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000 000,00
8	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
						Persentase ketercapain penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persentase	12 Laporan	100 Persentase	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	7.000 000,00
8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								5.000.000;					10.000.000,(
8	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
						Persentase ketercapain penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat daerah	- Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persentase	12 Laporan	100 Persentase	5.000.000;	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	10.000.000,(

Dipindai dengan CamScanner

8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								98.417.100;					203.[illegible]
8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Persentase ketercapain penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase ketersediaan Administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persentase	12 Paket	100 Persentase	9.976300;	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	25.00[illegible]
8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
						Persentase ketercapain penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Fasilasi Kunjungan Tamu	Persentase ketersediaan Administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persentase	12 Laporan	100 Persentase	15.000.000;	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	35.00[illegible]
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Persentase ketercapain penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketersediaan Administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persentase	100 Laporan	100 Persentase	48.839.700;	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	129.1[illegible]
8	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													

Dipindai dengan CamScanner

						Persentase ketercapain penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketersediaan Administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persentase	12 Dokumen	100 Persentase	4.104.000;	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	4.000 000,0(
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								18.645.000;					26.49?.860,(
8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Persentase ketercapain penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketersediaan jasa penunjang perangkat daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persentase	12 Laporan	100 Persentase	1.552.500;	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000 000,0(
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

Dipindai dengan CamScanner

						Persentase ketercapain penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase ketersediaan jasa penunjang perangkat daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persentase	12 Laporan	100 Persentase	1.500.000;	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.000.000,0(
8	01	01	2	08															
8	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor														
						Persentase ketercapain penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Persentase ketersediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	- Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persentase	12 Laporan	100 Persentase	2.000.000;	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	22.49?.860,((
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Persentase ketercapain penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase ketersediaan jasa penunjang perangkat daerah	- Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persentase	12 Laporan	100 Persentase	13.592.500;	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	22.49?.860,((
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								46.740.000;					40.00?.000,((
8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

Dipindai dengan CamScanner

						Persentase ketercapain penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang baik atau siap pakai	Persentase ketercapain penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/kota	- Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persentase	12 Unit	100 Persentase	41.740.000;	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	40.00[illegible]
8	01	31	2.09	0002	Penyediaan jasa pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan														
						Persentase ketercapain penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang pajak terbayar	Persentase ketercapain penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/kota	Kantor Badan Kesbangpol	100 Persentase	12 Unit	100 Persentase	5.000.000;	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	5.0[illegible].000
8	01	32			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN								830.073.000;						830.073.000
8	01	32	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								630.073.000;						725.2[illegible].359
8	01	32	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														

Dipindai dengan CamScanner

						Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Meningkatkan masyarakat yang paham tentang Ideologi Pancasila dan Masyarakat yang paham tentang kewaspadaan dan deteksi Dini	- Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Dokumen	100 Persentase	9.998.000;	Dana Transfer-Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	53.249.000,(
8	01	02	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													
						Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Meningkatkan masyarakat yang paham tentang Ideologi Pancasila dan Masyarakat yang paham tentang kewaspadaan dan deteksi Dini	- Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	150 Dokumen	100 Persentase	20.035.000;	Dana Transfer-Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	150 Dokumen	60.501.000,(

Dipindai dengan CamScanner

8	01	02	2.01	0008	Pemberdayaan Paskibraka													
						Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Paskibraka	Meningkatkan masyarakat yang paham tentang Ideologi Pancasila dan Masyarakat yang paham tentang kewaspadaan dan deteksi Dini	- Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	60 Orang	100 Persentase	600.040.000;	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paskibraka	55 Orang	0,0
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								579.566.120;					579.566.120
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								579.566.120;					579.566.120
8	01	03	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													

Dipindai dengan CamScanner

						Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Presentase peran Partai Politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta buadaya politik	- Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	100 Dokumen	100 Persentase	10.000.000;	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	100 Dokumen	10.000.000
8	01	03	2.01	0002	Penyusunan bahan perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														

Dipindai dengan CamScanner

						Presentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Penilaian Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Presentase peran Partai Politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	- Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Dok	100 Persentase	15.000.000,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Dok	15.000.000
8	01	11	2 01	0004	Pelaksanaan Evaluasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Penilaian Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																

Dipindai dengan CamScanner

						Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Presentase peran Partai Politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta buadaya politik	- Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	100 Orang	100 Persentase	10.001.000;	Dana Transfer-Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	55.240.000,(
8	01	13	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														

Dipindai dengan CamScanner

					Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Presentase peran Partai Politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	- Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	100 Laporan	100 Persentase	544.565.120;	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Laporan	544.565.120
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						20.000.000,00							230.945.000
											20.000.000,00							230.945.000

Dipindai dengan CamScanner

						Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Pengisyaratan Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Presentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	- Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	4 Dokumen	100 Persentase	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Pengisyaratan Kepercayaan di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	220.0[illegible]0
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								37.676.000;						170.3[illegible]5.500 0
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Penentapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial								37.636.000;						170.3[illegible]5.500 0
8	01	06	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														

Dipindai dengan CamScanner

						Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	- Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1Dokumen	100 Persentase	8.000.000;	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	150 Dokumen	105.365.5000
8	01	06	2.01	0004	Penyusunan bahan perumusan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														

Dipindai dengan CamScanner

| | | |

						P rsentase P ningkatan K waspadaa N sional da P ningkatan K alitas dar F silitasi P nanganan K nflik S sial	Jumlah Orang yang Meng kuti Koor inasi di Bida g Kewa spadaan Dini, Kerja Sama Inteli en, Pema ntauan Oran Asing, Tena a Kerja Asin dan Lemb iga Asin , Kewa spadaan Perbi asan antar Negara, Fasili asi Kele bagaan Bida g Kewa spadaan, serta Pena ganan Konf k di Daer h	Persenta e Perumus n Kebijaku Teknis d n Pelaksar an Pemanta an Kewaspa taan Nasional dan Penanga an Konflik osial	- Kab. Tanggarai Timur, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	100 Persen	12 Orang	100 Persent ase	29. 57.500,0	Dana Transfer Umum Dana Alokas Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Orang	3 .000.000,0
8	01	K	2.01	0005	Pelaksa aan koord nasi di Bi ang Kewa spadaan D ni, Kerja ama Intel en, Pema tauan Ora g Asing, enaga Kerja A ing dan L mbaga As ng, Kewa padaan P batasan a tar Negar , Fasilitas Kelemba aan Bidang Kewasp daan, sert Penanga an Konfli di Daera																	

Dipindai dengan CamScanner

| | | |

1. Dukungan manajemen, dan dukungan teknis lainya Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa Dan Politik dengan indicator kinerja berkaitan dengan urusan administrasi internal, serta pendidikan kewarganegaraan.
2. Bina ideology dan wawasan kebangsaan yang diserahkan pada pembangunan nilai wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa serta pendidikan kewarganegaraan.
3. Kewaspadaan nasionanl yang diarahkan politik dan pemerintahan umum kepada manajemen konflik, penanganan dan penyelesaian konflik, dokumen laporan situasi kondisi politik se-Indonesia, serta penyusunan rumus kebijakan perkenaan dengan kewaspadaan nasional
4. Ketahanan nasional, seni budaya, agama, dan kemasyarakatan dengan indicator diarahkan pada :
    a. Fungsi, peran, koordinasi dalam Peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menegah daerah, serta tata cara perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang akan datang merupakan Tahun pelaksanaan Rencana Kerja Tahun I Periode Renstra tahun 2025-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Masyarakat Kabupaten Manggarai Timur. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun anggaran.

Sebagai Dokumen Rencana Kerja Tahunan Satuan Perangkat Daerah, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Manggarai Timur mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1) Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategi (RENSTRA) instansi sesuai dengan arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2) Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program /kegiatan dalam KUA dan PPAS dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025
3) Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud realisasi dari kinerja Satuan kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan

Dipindai dengan CamScanner

dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain, Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur dan berdasarkan hasil pembahasan RKT I, RKT II, RKT III, RKT IV, dan RKT V :

1) Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berkenaan.
2) Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas tahun sebelumnya sebagaimana tercantum dalam Visi, Misi RPJMD tahun berkenan.
3) Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang.
4) Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan pendanaan yang menunjukan prakiraan maju.

Dipindai dengan CamScanner

BAB. IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2025-2026, maka **kebijakan umum pembangunan SDM diarahkan pada: Persentase masyarakat yang paham tentang kesatuan bangsa dan politik.**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan Tugas dan Fungsi untuk mensukseskan RKPD Periode 2025-2026 dengan tujuan Perangkat Daerah yaitu meningkatkan masyarakat yang paham tentang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan indikator Tujuan /Sasaran Capaian yaitu Indeks KesbangPol *73,2*

Berdasarkan Program Umum yang telah ditetapkan tersebut, maka program yang digariskan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Manggarai Timur adalah:

1. Program Penunjang Urusan pemerintahann daerah kab/kota:
2. Program Penguatan ideology Pancasila dan karakter kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan lembaga penndidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta udaya politik;
4. Program Pembiunaan dan penge„bangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;

Untuk mewujudkan visi dalam melaksanakan sasaran dan kebijakan strategis tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Manggarai Timur menyusun rencana Kerja Tahun 2023 dan merupakan penjabaran RPD Perubahan 2025 – 2026.

Sejalan dengan hal tersebut, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Manggarai Timur tahun 2025 menyesuaikan beberapa ketentuan terkait dengan kegiatan dan anggaran untuk menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Daerah

Dipindai dengan CamScanner

A. Rekapitulasi program dan kegiatan antara lain meliputi :

1. Program dan Kegiatan

No	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Keluaran Sub. Kegiatan	Target
1	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	3 Dok
			2. Koordinasi dan penyusunan RKA Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah yang tersusun	3 Dok
			3. Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA yg tersusun	1 Dok
			4. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah dokumen yg tersedia	12 Laporan
			5.Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Laporan
		2. Administrasi Keuangan	1. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah bulan gaji dan tunjangan ASN	12 bln
			2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bln

Dipindai dengan CamScanner

			3. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah dokumen pelaporan yg tersusun	12 Dok
			4.Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan
			5.Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	12 Laporan
		3. Administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah	1. Penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah pada perangkat Daerah	12 blr
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan peralatan rumah tangga 2. Penyediaan bahan logistik kant 3. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanga.	Jumlah paket peralatan rumah tangga Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Paket 1Paket 12 Dokumen

Dipindai dengan CamScanner

			4. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan	12 Bulan
			5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan dan minum kantor Jumlah kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	
			6. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Paket Data Internet	
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas	1 Unit
			2. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Unit
		6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyedaan jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional lapangan	12 Bulan
		7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	12 Bulan
			2. Penyediaan Jasa Sumber daya air dan listrik	Jumlah Kebutuhan air dan listrik	12 Bulan
			3. Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah petugas kebersihan gedung kantor	12 Bulan

Dipindai dengan CamScanner

		8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1. Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan.	12 Unit
2.	**Program : Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**	9. Perumusan Kebijakan Teknis dan penantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	1. Penyusunan Program kerja di Bidang Ideolog Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi FKUB Tingkat Kabupaten Manggarai Timur	100 Orang
			2. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	100 Orang
			3. Pelaksanaan koordinasi di Bidang Ideolog Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,	Jumlah peserta siswa/I tingkat SMA/SMK yang mengikuti kegiatan sosialisasi Nilai-nilai	50 Orang

Dipindai dengan CamScanner

			Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	luhur Budaya Bangsa	
			4. Pembentukan Paskibraka	Jumlah anggota Paskibraka	55 Orang
3.	**Program : Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	10. Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah , Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1. Penyusunan Bahan perumusan kebijakan di Bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah.	Jumlah Peserta kegiatan sosialisasi Undang-undang di Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia	100 Orang
			2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan	Jumlah Orang/lembaga yang Mengikuti Koordinas di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	4 Orang/Lembaga

Dipindai dengan CamScanner

			pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah.	Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Dana Hibah PILKADA)	
			3. Pelaksanaan koordinas di Bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang

Dipindai dengan CamScanner

			4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah.	Jumlah bantuan keuangan /dana bah kepada Partai Politik 12 PARPOL 12 Parpol
			5. Pelaksanaan Tugas Paskibra	Jumlah Laporan kegiatan pelaksanaan tugas Paskibraka

Dipindai dengan CamScanner

4.	**Program : Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya**	10. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya	1. Penyusunan Program Kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan Umat Beragama dan Penghayat kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Perghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (rapat-rapat koordinasi FORKOPIMDA Tingkat Kab. Manggarai Timur)	4 Rapat
5.	**Program : Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial**	11. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Jumlah sosialisasi FKDM Kecamatan yang terbentuk dan masyarakat yang mengikuti sosialisasi	200 Orang

Dipindai dengan CamScanner

				Jumlah Kegiatan Koordinasi, monitoring dan konsultasi TIM FKDM	4 kali Rapat
			2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadan, serta penanganan konflik di Daerah	Jumlah rapat rencana aksi penanganan gangguan Keamanan Tingkat Kabupaten Manggarai Timur	12 Bulan

Dipindai dengan CamScanner

			3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang
6.	**Program : Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	12. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	1. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah pembinaan terhadap LSM, Ormas, OKP dan Paguyuban yang terdata dan dilakukan pembinaan	100 Ormas

Dipindai dengan CamScanner

- TOTAL BELANJA : Rp. 2.845.200.584,
- BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai (Gaji) sebesar Rp . terdiri dari

1. Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar : Rp. 1.275.883.972,

- BELANJA LANGSUNG

Belanja Langsung : Rp. 1.569.316.612;

2. **Program : Penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;**
   1. **Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

      Sub. Kegiatan:

      1) Penyusunan dokumen perencannaan perangkat daerah Rp. 5.000.000;
      2) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA –SKPD Rp. 5.000.000;
      3) Koordinasi da penyusunan perubahan DPA- SKPD Rp. 5.000.000;
      4) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD Rp. 7.000.000;
      5) Evaluasi kinerja perangkat daerah . Rp.3.500..000;
   2. **Kegiatan : Administrasi keuangan perangkat daerah**

      Sub. Kegiatan:

      1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Rp. 1.275.883.972;
      2) Penyediaan administras pelaksanaan tugas ASN Rp. 102.897.392;
      3) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran **SKPD Rp. 5.000.000;**
   3. **Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah**

      Sub. Kegiatan:

      1) Penatausahaan barang milik daerah pada OPD Rp. 5.000.000;
   4. **Administrasi Umum Perangkat daerah**

      1) Penyediaan logistic kantor Rp.19.976.300;
      2) Penyediaan arang cetakan dan penggandaan Rp.9.495.100;
      3) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp. 5.144.600;
      4) Penyediaan bahan bacaan Rp.1.000.000;
      5) Fasilitasi kunjungan tamu Rp. 15.000.000;
      6) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi OPD Rp. 48.839.700;
      7) Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada OPD Rp.4.104.000;

Dipindai dengan CamScanner

5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
    1. penyediaan jasa surat menyurat Rp. 1.552.500;
    2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp. 1.500.000;
    3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 2.000.000;
    4. penyediaan jasa pelayanan umum kantor Rp. 22.499.000;
    5. penyediaan jasa pelayanan umum kantor Rp. 13.582.500;

6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daearah
    1. Penyediaan jasa pemeliharaan / biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional kantor Rp. 41.740.000;
    2. Penyediaan jas perizinan kendaraaan dinas operasional kantor Rp. 5.000.000;

3. **Program : Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;**

Kegiatan:

1) Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideology Pancasila dan Karakter kebangsaan

Sub. Kegiatan:

1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Rp. 9.998.000;;
2) Perumusan kebijakan teknis didang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Rp. 20.035.000;
3) Pembentukan Paskibraka Rp. 600.040.000;

4. **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**

Kegiatan:

1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Sub. Kegiatan :

1. Jumlah perserta yg mengikuti sosialisasi UU dibidang politik hukum dan HAM Rp. 10.000.000;

2) Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,

Dipindai dengan CamScanner

Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Sub. Kegiatan :

1. Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Dana Hibah PARPOL) Rp. 15.000.000;

3) Pelaksanaan koordinasi dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Sub. Kegiatan :

Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Rp. 10.000.000;

4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

1. Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Jumlah bantuan keuang /dana hibah kepadapartai politik Rp. 544.565.120;

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Sub. Kegiatan:

1. Penyusunan program kerja dibidang ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi penceganan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama, dan penghayat kepercayaan di daerah

1.Jumlah rapat-rapat koordinasi FORKOPIMDA tingkat Kab. Manggarai Timur Rp. 20.000.000;

Dipindai dengan CamScanner

6. **Program: Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

Sub. Kegiatan

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
   - Jumlah peserta yg mengikuti sosialisasi FKDM Rp. 8.000.000;
2. Penyusunan bahan perumusan dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
   - Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah .Anggota rapat rencana aksi penanganan gangguan keamanan tingkat Kab. Manggarai Timur Rp. 13.000.000;;
3. Pelaksanaan koordinasi dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
   - Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Sub. Kegiatan ini didukung dengan anggaran Rp. 16.678.000;

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025, merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Perubahan Badan KesbangPol Kabupaten Manggarai Timur 2025-2026. Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Manggarai Timur dibuat untuk menunjang tercapainya tujuan RPD tahun 2025

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan KesbangPol Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran RKP, instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur maupun OPD yang membidangi fungsi lain.

Borong, 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Drs. ADOLFUS J.TAHU
NIP. 19650807 199903 1 004

Dipindai dengan CamScanner